

## **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN IPM KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**I Made Prastawa Adi Guna<sup>1</sup>**

**Nyoman Yuliarmi<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya namun, masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, investasi dan upah minimum terhadap kesempatan kerja dan ipm kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data-data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur. Hasil analisis data diperoleh Tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Tingkat pendidikan, investasi, upah minimum dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Kesempatan kerja memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kesempatan kerja memediasi secara parsial pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat, namun kesempatan kerja tidak memediasi secara parsial pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.

**Kata kunci:** *tingkat pendidikan, investasi, upah minimum, kesempatan kerja, ipm.*

### **ABSTRACT**

*Various efforts government to increase growth for the region have a positive impact on welfare, there is still an imbalance of community welfare between regencies / cities in Bali Province. The purpose of this study is to analyze the influence of the level education, investment and minimum wages for employment opportunities and IPM districts / cities in Bali Province. This research is sourced from secondary data. The data collection method is data published by BPS in the Province of Bali. Technique analysis used by path analysis. The results of data analysis obtained the level of education and investment have a positive and significant effect on employment opportunities, while the minimum wage has a positive but not significant effect on employment opportunities. The level of education, investment, minimum wage and employment opportunities has a positive and significant impact on the welfare in Bali Province Regency / City. Employment opportunities partially mediate the effect of education levels on welfare, and employment opportunities partially mediate the effect of investment on welfare, but employment opportunities do not partially mediate the effect of minimum wages on welfare in Bali Regency / City.*

*Keywords: education level, investment, minimum wage, employment opportunity, ipm*

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Indonesia, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semaksimal sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan modal suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia dimana manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif dalam mengumpulkan modal, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik, dan melaksanakan pembangunan nasional (Krismiyati, 2017).

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Raden Pardede dan Shirin Zahro (2017) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Artana Yasa (2015) berpendapat bahwa pemerintah daerah

dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosita, 2016). Ketimpangan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sumber daya manusia, perubahan demografi, pengangguran, dan migrasi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata (Silvia dan Sumarto, 2014). Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Pembangunan sumber daya manusia perlu diperhatikan agar dapat menggunakan peluang yang ada untuk mempertahankan perekonomian tetap tumbuh (Hukom, 2014). Perwujudan *Good Governance*, dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi di bidang pemerintahan akan menjaga tercapainya angka indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah Provinsi Bali (Rustariyuni, 2012). Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang

beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pola pemerintah yang dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan penurunan angka kesejahteraan masyarakat yang dapat dipantau dengan melihat tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Nilai IPM Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 74,77 dan berada diatas nilai IPM Nasional sebesar 71,39. Meskipun terus mengalami peningkatan dan kini berada pada lima besar nasional, IPM Provinsi Bali masih mengalami disparitas antar daerahnya. IPM Provinsi Bali seharusnya bisa berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini terkait dengan Provinsi Bali yang merupakan daerah pariwisata dan merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia (Ndakularak, 2014). Dalam penelitian Bendesa dan Sukarsa (1980) menyatakan, Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal dengan daerah penghasil padi, namun satu decade lalu industri pariwisata merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh Provinsi Bali. Tabel 1 merupakan angka IPM Provinsi Bali pada tahun 2014 – 2018.

**Tabel 1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Poin)**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65
Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45
Badung	77,98	78,86	79,8	80,54	80,87
Gianyar	74,29	75,03	75,7	76,09	76,61
Klungkung	68,3	68,98	69,31	70,13	70,9
Bangli	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96
Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49
Buleleng	69,19	70,03	70,65	71,11	71,7
Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,01	83,3
<b>Provinsi Bali</b>	72,48	73,27	73,65	74,3	74,77

*Sumber : BPS, Provinsi Bali. 2018*

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat terlihat bahwa telah terjadi peningkatan angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali. Meskipun angka IPM cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018, rata-rata pertumbuhan IPM cenderung masih rendah yakni di bawah 1 persen. Nilai IPM yang terendah terdapat pada tahun 2014 di kabupaten karangasem sebesar 64,01. Sedangkan IPM tertinggi terdapat pada kota Denpasar sebesar 83,3 pada tahun 2018. Hal ini merupakan sebuah ketimpangan dalam pencapaian IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Bali karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia juga sarana prasaran baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun yang lain sebagai indikator IPM. IPM menjadi sangat penting, strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama pemerintah, sebagai bahan rujukan dalam mengambil berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah.

Pentingnya peran pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas manusia. Realitas dapat dilihat dengan menginvestasikan pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja (Inda Arfa, 2017). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pembangunan ekonomi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Anggatia, 2014).

Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa tidak dapat berkembang dengan baik maka pembangunan bangsa tersebut akan terganggu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa (Christian Dustmann, 2002). Menurut Kamaludin (1999:59) semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk bekerja. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan ataupun keahlian yang beragam sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi di Negara yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Pendidikan informal meliputi pendidikan dari keluarga dan lingkungan, sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Pendidikan ini diukur dengan melihat dalam data rata-rata lama sekolah (BPS Provinsi Bali, 2019). Rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi ini masih belum mencapai target pendidikan maksimal 15 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah diusulkan *United Nation Development Programs (UNDP)*. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Bali terhitung masih belum menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga itu menjadi permasalahan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pendidikan agar tercapai pemerataan pendidikan di setiap daerah (Wirawan, 2015).

Peningkatan pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) (Nafzinger, 1997). Peningkatan pengeluaran pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, *physical capital*, output daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, *disposable income*, penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumahtangga, investasi, pengeluaran per kapita, serta penurunan angka pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Peningkatan investasi akan menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan penurunan ketimpangan pendapatan (tidak terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan).

Investasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan di masa datang yang berguna untuk mengantisipasi adanya inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Investasi juga dapat diartikan sebagai pembelian suatu aset dengan harapan bahwa aset tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa datang. Namun keuntungan yang diperoleh tersebut tentunya juga akan sebanding dengan resiko yang harus dihadapi oleh investor dimana keuntungan yang tinggi tentunya juga akan diikuti dengan resiko yang tinggi (Ahmad, 2004).

Faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Naiknya angka investasi perlu dibarengi dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi, pemerintah perlu mengupayakan agar hal tersebut dapat terwujud dan tidak menyebabkan semakin lebarnya disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali. Selain upaya yang dilakukan dari dalam daerah sendiri proses pembangunan dan pemerataan ekonomi juga memerlukan bantuan modal atau dana pembangunan dengan mengundang pihak luar/investor untuk membiayai proses pembangunan tersebut (Suwandika, 2015).

Pemerataan penanaman modal di Provinsi Bali diharapkan akan mampu menciptakan pemerataan kesempatan kerja. Namun, terlihat pada data PMA dan PMDN kenyataannya realisasi investasi masih tidak merata, karena di beberapa wilayah belum mendapat perhatian dari investor sebesar wilayah yang sudah dapat dikategorikan maju. Kondisi investasi yang kurang merata mengakibatkan kurang meratanya kesempatan kerja yang selanjutnya berimbas pada tingginya pengangguran dan berakibat rendahnya kesejahteraan masyarakat (BPS, Provinsi Bali, 2019).

Menurut Tambunan (Gama, 2008) menyatakan adanya tidak meratanya investasi antar daerah dapat menyebabkan terjadinya kurangnya lapangan pekerjaan antar daerah. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi pada daerah-daerah yang sudah dikategorikan maju karena terdapat kemudahan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja di daerah tersebut. Menurut Hirschman terdapat perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan investasi karena investor tentu saja akan memilih wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan (Yeniwati, 2013).

Investasi sering diartikan masyarakat sebagai penanaman modal dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri (Abdullah, 2011: 10). Menurut Jogiyanto (2010: 5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Investasi dapat diartikan pula sebagai penanam modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut (Wibowo, 2010). Menurut Tandililin (2007: 3) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Faktor tingkat upah sangat penting untuk mendukung pembangunan. Dengan adanya perbaikan upah maka akan terjadi peningkatan pendapatan pekerja dan daya beli masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang akan membuat perkembangan pada perusahaan-perusahaan yang ada. Perbaikan upah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru

dan peningkatan produktifitas. Usaha dalam perluasan kegiatan industri dalam meningkatkan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti nilai investasi, upah dan jumlah unit usaha.

Kesempatan kerja bagi setiap warganegara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dasar Negara Indonesia. Kesempatan kerja adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lahan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal Ini akan menimbulkan kesenjangan antaran permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran.

Kesempatan kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (*Human Basic Needs*) yang tidak ada bedanya dengan sandang, pangan dan papan serta juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian suatu daerah. Kesempatan kerja dapat memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat suatu Negara dalam membangun perekonomiannya. Selain itu, indikator ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat (Sunariani, 2014).

Seiring dengan tuntutan akan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali khususnya, diperlukan tenaga-tenaga kerja yang profesional. Hal ini diperlukan taraf hidup para pekerja, mengingat masih

tingginya tingkat taraf hidup kemiskinan masyarakat Bali. Agar dapat bangkit dari keterpurukan tersebut pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk bekerja keras. Apalagi Indonesia sekarang telah memasuki era globalisasi dimana saling ketergantungan perekonomian lintas negara makin kuat dan makin sarat dengan persaingan. Dengan demikian perlu pembenahan dan persiapan diberbagai bidang antara lain menyangkut sumber daya manusia dan ketenagakerjaan guna mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, investasi dan upah minimum terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; (2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, investasi, upah minimum dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; (3) Untuk menganalisis bahwa kesempatan kerja memediasi pengaruh tingkat pendidikan, investasi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian antara kabupaten/kota dikarenakan penulis melihat masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang meliputi tingkat pendidikan, jumlah investasi, upah minimum dan kesejahteraan masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel eksogen dan variabel endogen melalui variabel mediasi.

Hubungan variabel tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual yang didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Menurut penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja, hal ini menyatakan pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang semakin penting agar generasi Indonesia bisa bersaing dalam persaingan lokal maupun Internasional dalam mendapatkan kesempatan kerja (Manuaba, 2016). Hasil ini searah dengan pernyataan Meylina et al. (2013) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas tentunya akan membentuk SDM yang berkualitas sehingga mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2004). Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan menurut Teori Harrod-Domar (Mulyadi, 2000) investasi tidak hanya menciptakan permintaan kesempatan kerja, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Kenaikan upah tenaga kerja tersebut dapat mengurangi jam kerja lemburnya karena dengan naiknya upah akan menambah pendapatannya. Namun dengan kenaikan upah minimum tersebut akan berdampak pada kesempatan kerja yang berkurang, karena

dengan naiknya upah akan menambah biaya- biaya dalam perusahaan sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Menurut penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Tingkat Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesempatan kerja di Provinsi Bali (Permana, 2015). Tetapi menurut penelitian lainnya menyatakan bahwa adanya pengaruh tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2002-2011. Tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Peningkatan tingkat upah ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat dan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga kesempatan kerja mengalami kenaikan (Rahmawati, 2015).

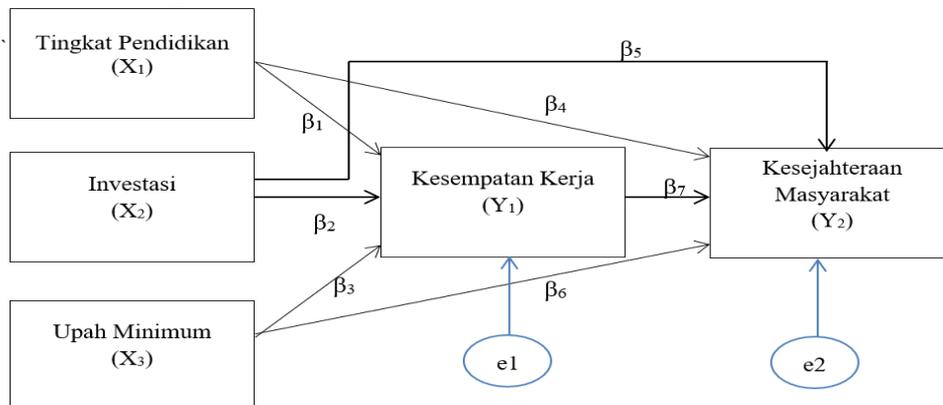
Menurut Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi melalui peningkatan kemampuan manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Budiarti, 2012). Menurut penelitian sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat (Aini dkk, 2018).

Investasi pada berbagai sektor akan dapat mempercepat pembangunan di negara-negara berkembang dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Rachman, 2010). Kehadiran investasi di Provinsi Bali khususnya sangat diperlukan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi (Adnan, 2010).. Menurut penelitian

sebelumnya menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Wiagustini dkk, 2017).

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut penelitian sebelumnya tingkat upah berpengaruh positif pada kesejahteraan. Apabila upah yang diterima semakin sesuai dengan kebutuhan hidup maka kebutuhan akan sandang, pangan dan tempat tinggal akan terpenuhi. Sehingga kesejahteraan akan semakin baik (Eldy et all, 2016).

Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa kesempatan kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat berjalan searah, artinya apabila kesempatan kerja meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2012). Tetapi menurut penelitian yang lain menyatakan bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Awandari, 2016). Menurut Hukom (2014) Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Hubungan Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat**

Persamaan Substruktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan Substruktur II

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- X1 = Tingkat Pendidikan
- X2 = Investasi
- X3 = Upah Minimum
- Y1 = Kesempatan Kerja
- Y2 = Kesejahteraan Masyarakat
- e1,e2 = Error
- $\beta_1 \dots \beta_7$  = koefisien jalur masing-masing variabel

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, investasi, dan upah minimum terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan program SPSS terhadap model persamaan.

**Tabel 2 Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel**

Hubungan Variabel	<i>Standardized Coefficient Beta</i>	P. Value	Keterangan
X <sub>1</sub> → Y <sub>1</sub>	0.341	0.026	Signifikan
X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	0.846	0.000	Signifikan
X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub>	0.370	0.014	Signifikan
X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub>	0.034	0.036	Signifikan
X <sub>3</sub> → Y <sub>1</sub>	0.013	0.923	Tidak Signifikan
X <sub>3</sub> → Y <sub>2</sub>	0.046	0.006	Signifikan
Y <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	0.185	0.000	Signifikan

Keterangan:

- X1 = Tingkat Pendidikan
- X2 = Investasi
- X3 = Upah Minimum
- Y1 = Kesempatan Kerja
- Y2 = Kesejahteraan Masyarakat

### **Pengaruh Langsung Variabel**

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja**

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan, investasi dan upah minimum terhadap kesempatan kerja secara langsung yang dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22. Hasil analisis menunjukkan model persamaan struktural 1 dapat disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0.341 X_1 + 0.370 X_2 + 0.013 X_3$$

#### **Pengaruh langsung tingkat pendidikan ( $X_1$ ) terhadap kesempatan kerja ( $Y_1$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.341 dan nilai *probabilitas* sebesar  $0.026 < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya tingkat pendidikan maka kesempatan kerja semakin meningkat. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, ini berarti bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang semakin penting agar generasi Indonesia bisa bersaing dalam persaingan lokal maupun internasional dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Hasil ini searah dengan pernyataan Meylina *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa pemerataan kesempatan kerja memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas tentunya akan membentuk SDM yang berkualitas sehingga mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Chon (1979) membuktikan dalam penelitiannya bahwa individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan, dan peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya.

### **Pengaruh langsung Investasi ( $X_2$ ) terhadap kesempatan kerja ( $Y_1$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0.370 dan nilai probabilitas  $0.014 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya investasi maka kesempatan kerja semakin meningkat.

Hubungan positif dan signifikan investasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, memberi makna bahwa investasi yang didapat mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja di Provinsi Bali. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucitrawati (2012); Manuaba (2016); Awandari (2016) yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, jika investasi meningkat maka kesempatan kerja juga akan meningkat. Hal ini mengindikasikan investasi memberikan pengaruh konkrit terhadap penciptaan kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Investasi yang diarahkan untuk pembangunan industri terutama industri padat karya, dimana industri padat karya tersebut lebih memberdayakan tenaga manusia ketimbang mesin. Misalnya seperti industri yang

bergerak di bidang jasa, industri tekstil dan industri furniture yang lebih banyak mengandalkan tenaga manusia. Dengan pembangunan industri padat karya tersebut di suatu daerah dapat lebih memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

### **Pengaruh langsung Upah Minimum ( $X_3$ ) terhadap kesempatan kerja ( $Y_1$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.013 dan nilai probabilitas  $0.923 > 0.05$  ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya upah minimum maka kesempatan kerja semakin meningkat.

Hubungan positif namun tidak signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti besaran upah minimum yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja untuk masyarakat Provinsi Bali. Tidak adanya pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja di dalam penelitian ini, menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indradewa (2015). Adapun faktor yang mengakibatkan upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tidak memiliki dampak terhadap kesempatan kerja karena masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang memberikan upah terhadap karyawan masih di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Selain itu masih dominannya penduduk yang bekerja di sektor informal, pekerjaan tersebut tidak memiliki jaminan untuk membayar upah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Randy (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini berbeda dengan penelitian

yang sebelumnya dilakukan oleh Capeding *et al.*, (2013); Nababan, (2017); Putri dan Sasana, (2017), yang mengatakan bahwa adanya kenaikan upah minimum akan meningkatkan kesempatan kerja.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi, Upah Minimum, dan Kesempatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan, investasi, upah minimum, dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung yang dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22 maka hasil uji regresi disajikan dalam (Lampiran 3). Hasil pengujian menunjukkan model persamaan struktural 2 dapat disajikan sebagai berikut :

$$\hat{Y}_2 = 0.846 X_1 + 0.034 X_2 + 0.046 X_3 + 0.185 Y_1$$

### **Pengaruh tingkat pendidikan ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.846 dan nilai probabilitas  $0.000 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya tingkat pendidikan maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Menurut Schweke (2004), pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Artana Yasa, 2017). Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja bermanfaat bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.

**Pengaruh investasi ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.034 dan nilai probabilitas  $0.036 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya investasi maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Krismajaya (2019), Jayanthi (2019), Krisna Pratama (2018), menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran, akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya kegiatan investasi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

**Pengaruh Upah Minimum ( $X_3$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.046 dan nilai probabilitas  $0.006 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya upah minimum maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil ini searah dengan penelitian oleh Eldy *et al.*, (2016) menyatakan upah minimum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Apabila upah yang diterima semakin sesuai dengan kebutuhan hidup maka kebutuhan akan sandang, pangan dan tempat tinggal akan terpenuhi. Sehingga kesejahteraan akan semakin baik. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

**Pengaruh Kesempatan Kerja ( $Y_1$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.185 dan nilai probabilitas  $0.000 < 0.05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya kesempatan kerja maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh

pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja maka semakin luas kesempatan kerja. Terciptanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang luas, diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk yang bekerja memperoleh pendapatan, dimana pendapatan merupakan unsur yang terdapat pada masyarakat yang sejahtera yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini searah dengan penelitian dilakukan oleh Awandari (2017), Esmara (1986), dan Lopian (2013), searah juga menurut Hukom (2014), peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat meningkat.

### **Pemeriksaan Validitas Model**

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

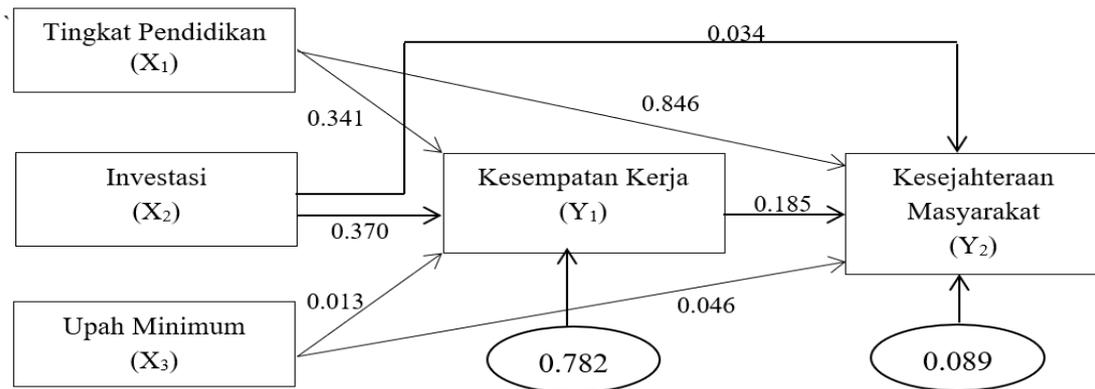
$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0.782)^2 - (0.089)^2 \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

Keterangan:

$R^2_m$  : Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 99 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 99 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Berdasarkan hasil analisis dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22 dalam penelitian ini maka dapat ditunjukkan hasil analisis jalur pada Gambar 2 sebagai berikut.



**Gambar 2 Diagram Hasil Analisis Jalur Hubungan Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat**

**Pengaruh Tidak Langsung Variabel**

**Pengaruh tidak langsung Tingkat Pendidikan (X<sub>1</sub>) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y<sub>2</sub>) melalui Kesempatan Kerja (Y<sub>1</sub>).**

Statistik Uji

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S\beta_1^2 + \beta_1^2 S\beta_7^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(0.029^2)(0.345^2) + (0.801^2)(0.003^2)}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = 0.010$$

Menghitung Nilai z-Hitung

$$z = \frac{\beta_1\beta_7}{S_{\beta_1\beta_7}}$$

$$z = \frac{(0.801)(0.029)}{0.010}$$

$$z = 2.32$$

Oleh karena z hitung sebesar 2.32 > 1.96 artinya kesempatan kerja merupakan variabel yang memediasi tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja.

**Pengaruh tidak langsung Investasi (X<sub>2</sub>) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y<sub>2</sub>) melalui Kesempatan Kerja (Y<sub>1</sub>).**

Statistik Uji

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(0.029^2)(0.039^2) + (0.099^2)(0.003^2)}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = 0.001$$

Menghitung nilai z-Hitung

$$z = \frac{\beta_2\beta_7}{S_{\beta_2\beta_7}}$$

$$z = \frac{(0.099)(0.029)}{0.001}$$

$$z = 2.87$$

Oleh karena z hitung sebesar  $2.87 > 1.96$  artinya kesempatan kerja merupakan variabel yang memediasi investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja.

**Pengaruh tidak langsung Upah Minimum (X<sub>3</sub>) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y<sub>2</sub>) melalui Kesempatan Kerja (Y<sub>1</sub>).**

Oleh karena hasil analisis hubungan upah minimum terhadap kesempatan kerja tidak signifikan maka artinya kesempatan kerja bukan merupakan variabel yang memediasi upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain upah minimum berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tidak melalui kesempatan kerja.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.
- 2) Tingkat pendidikan, investasi, upah minimum dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.
- 3) Kesempatan kerja memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kesempatan kerja memediasi secara parsial pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat, namun kesempatan kerja tidak memediasi secara parsial pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain:

- 1) Untuk memaksimalkan peran pendidikan sebaiknya, pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam dunia kerja kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat.
- 2) Disarankan untuk meningkatkan investasi peran pemerintah untuk dapat mengupayakan penyebaran investasi secara merata di seluruh wilayah Provinsi

Bali, sehingga kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat lebih merata dan mengurangi ketimpangan di setiap daerahnya.

- 3) Disarankan pemerintah Provinsi Bali diharapkan melakukan upaya untuk mengkaji kembali perkembangan tingkat upah minimum sehingga dapat lebih efisien dalam kenaikan tingkat upah minimum tersebut mampu mendorong kesempatan kerja.

## REFERENSI

- Abdullah, Burhanuddin, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adnan, P. Eko Prasetyo. 2010. Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 13(3): 195-212
- Aini, E. Isnaini, I. Sukamti, S & Amalia, L. 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58-72.
- Ali, Hasnah, Er, A.C., Ahmad, A.R., Lyndon, N., Ahmad, Sanep. 2013. Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia. *Asian Sosial Science*. 9(14). Halaman: 209-218.
- Anggati, ariza, 2014, Pengaruh Perumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Islam.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Astri Meylina, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara, 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 1(1): h: 77-102
- Awandari, Luh Putu Putri dan I Gst Bgs Indrajaya. 2016. Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Udayana. ISSN: 2303-0178
- BAPPENAS and UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. 2004. The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia. Published Jointly by BPS- Statistic Indonesia.
- Bendes, I.K.G dan I Made Sukarsa. 1980. An Economic Survey of Bali. *Bulletin of Indonesia Studies*, 16(2), hal. 31-53.
- Bernhard Boockmann, 2010, The Combined Employment Effects Of Minimum Wages And Labor Market Regulation. A Meta-Analysis. IZA Discussion Paper No. 4983

- Budiarti, Devi dan Yoyok Seosaty. 2012. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2000-2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- Boediono. 2017. Revisiting the Problem of Development Distribution, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53:2, 211-217.
- Bozena Kaderabkova, Jonathan Jasova, 2016, Character And Intensity Of The Minimum Wage Influence On Unemployment In The Czech Republic And Slovakia. *International Journal Of Economic Sciences*. Vol. V, No. 1/2016.
- Capeding, M. R. Chua, M. N. Hadinegoro, S. R. Hussain, I. I. H. M. Nallusamy. (2013). Dengue and other common causes of acute febrile illness in Asia: an active surveillance study in children. *PLoS Neglected Tropical Diseases*.
- Chon, Elchanan, 1997. *The Economics of Education: An Introduction*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Christian Dustmann, Najma Rajah, Arthur van Soes, 2002, Class Size, Education, and Wages. IZA Discussion Paper No. 501.
- Dalamagas, Basil. 2010. Public Sektor and Economic Growth :The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2000,32, 277-288.
- Eldy, Elifaz. Ari Pradhanawati dan Hari Susanta Nugraha. 2016. Pengaruh Upah, Peran Serikat Pekerja terhadap Kesejahteraan Pekerja melalui Unjuk Rasa Pada Serikat Pekerja Nasional PSP PT Sai Apparel Industries. *Jurnal Diponegoro. Program studi Administrasi Bisnis*.
- Gama, Ayu Savitri. 2008. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* Volume 2 Nomor 1.
- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya.
- Inda, arfa syera, 2017, The Effect of Unemployment Rate, Human Development Index, Gross Domestic Product against Level of Poverty in Indonesia. Economics Department, State University of Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Inradewa, I Gusti Agung; Natha, Ketut Suardhika. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Jayanthi, Ni Kadek Eka. 2019. Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Krisna Pratama, AA Gede dan Ida Bagus Darsana. 2018. Pengaruh Kemiskinan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali
- Krismajaya, Putu; Martini Dewi, Ni Putu. 2019. Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Krismiati, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak. *Jurnal Office*, Vol.3, No.1, 2017. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

- Kurniawan Septyono, Sulistyanningrum Eny, 2017, Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2:193-215.
- Lapian, A.L.C.P. 2013. Analisis Faktor – Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
- Manuaba, Ida Bagus Adi Sutrisna; Kartika, I Nengah. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Meier, G. M. dan J. E. Rauch. 2000. *Leading Issues in Economics Development (Seventh Edition)*. New York – Oxford. Oxford University Press
- Nababan, T. S. (2017). The Effects of Number of Industrial Enterprises, Value of Input, Value of Output, and Regional Minimum Wage on Labor Demand in Indonesia: An Empirical Study on Micro Industrial Enterprises.
- Nafzinger. E Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*. Third Edition. Prentice-Hall. Inc.. New Jersey.
- Natasha Hamilton-Hart & Günther G. Schulze. 2016. Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 52(3) : 265-295.
- Ndakularak, Erwin. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 3, No. 3, Tahun 2014.
- Permana, I Gusti Agung Bagus Ari Surya; Wenagama, I Wayan. 2015. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi Di Provinsi Bali Tahun 1993-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Putri, V. K, dan Sasana, H. (2017). Pengaruh Faktor UMK, Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Swasta, serta Inflasi terhadap PDRB dan Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010=2015. Fakultas Ekonomi.
- Raden Pardede and Shirin Zahro. 2017. Saving not Spending: Indonesia's Domestic Demand Problem, *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*.
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2012. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004- 2012. *PIRAMIDA*, ISSN 1907-3275.
- Silvia, I.D., dan Sumarto, S. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 50(2). pp: 227-242.
- Simpem Arini Putu, Gede Bendesa I Komang, 2012, Pengaruh Hari Raya Galungan Pada Seasonal Adjustment IHK Dan Penentuan Komoditas Utama yang Mempengaruhi Inflasi di Provinsi Bali. Analisis Arima. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 5 No. 2: 79-86.
- Simona Ferraro, Birgit Hanilane, Karsten Staehr, 2018, Minimum Wages And Employment Retention. A Microeconomic Study For Estonia. *Baltic Journal Of Economics* 2018. Vol. 18, No. 1: 51-67
- Sunariani, Ni Nyoman, dkk. 2014. Kontribusi Pelaksanaan Ritual Hindu Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung Provinsi Bali (Studi Kasus Mlaspas dan Ngenteg Linggih di Pura Pase Desa

- Abiansemal). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
- Suwandika, Eka dan Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 4(7). Hal: 794-810.
- Suyana Utama, Made. 2016. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: CV Sastra Utama.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung . 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius
- Taufik, Muhammad, Eny Rochida dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman.
- Treena Wu. 2013. Constrains to Human Capital Investment in Developing Countries: Using The Asian Financial Crisis in Indonesia as a Natural Experiment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 1472-7234
- Wiagustini, Ni Luh Putu, dkk. 2017. Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10(2): 155-173.
- Wildan Syafitri, 2013, Determinants Of labour Migration Decisions: The Case Of East Java, Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 49:3, 385-386, DOI:10.1080/00074918.2013.850638.
- Wirawan, I Made Tony dan Sudarsana Arka, 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. ISSN: 2303-0178. Universitas Udayana.
- Yeniwati. 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. II, No. 03.